

Judul : Setrum energi hijau dipacu
Tanggal : Jumat, 28 Mei 2021
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

| INFRASTRUKTUR KELISTRIKAN 2021–2030 |

SETRUM ENERGI HIJAU DIPACU

JAKARTA — Pemerintah dan PT PLN (Persero) sepakat untuk memberi porsi yang lebih besar terhadap penambangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT) dalam draf Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPL 2021–2030.

Denis Riantiza Meilanova
denis.meilanova@bisnis.com

Dalam draf RUPL tersebut, porsi pembangkit EBT adalah sebesar 48% dan pembangkit fosil 52%. Angka ini lebih besar dibandingkan dengan porsi pada RUPL 2019–2028, yakni porsi pembangkit EBT sebesar 30% dan sisanya masih didominasi pembangkit fosil.

“RUPL yang sekarang kami susun kami upayakan lebih hijau. Porsi EBT akan lebih besar, sehingga kami bisa klaim RUPL yang kami susun ini green RUPL atau RUPL yang lebih hijau atau pro lingkungan,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana, Kamis (27/5).

Untuk mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025, pemerintah memutuskan untuk tidak lagi menerima usulan penambahan PLTU batu bara baru kecuali yang telah memasuki tahap *financial closing* atau konstruksi sesuai arahan Presiden dalam rapat terbatas 11 Mei 2021.

Sejumlah strategi disiapkan untuk mencapai target bauran EBT tersebut, antara lain mendahulukan pembangkit EBT yang paling murah. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) akan didorong lebih banyak karena harganya cenderung turun, mendorong *co-firing* pada PLTU, PLTP dan PLTA dikembangkan dengan jadwal *commercial operation date* yang lebih realistis, dan program penggantian diesel dengan pembangkit EBT.

Dalam draf RUPL 2021–2030, penambahan pembangkit dalam 10 tahun ke depan ditargetkan dapat mencapai 40.967 megawatt (MW). Dari jumlah tersebut, sebanyak 34.528 MW telah selesai didiskusikan dan sebanyak 6.439 MW masih memerlukan pendalaman.

“Draf RUPL saat ini masih berproses, masih diskusi. Banyak yang sudah kami sepakati, tapi ada juga yang masih perlu arahan langsung dari menteri,” kata Rida dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR.

Sementara itu, Komisi VII DPR berharap RUPL dapat disusun dengan cermat dan dapat segera terselesaikan, karena merupakan pedoman yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan infrastruktur ketenagalistrikan nasional.

“Namun, hingga hari ini RUPL 2021–2030 tak kunjung selesai di mana seharusnya pemerintah sudah mengesahkan RUPL pada akhir tahun lalu,” tegas Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno.

Kritik senada disua-

rakan oleh Mulyanto, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, karena PLN dianggap lambat bergerak. Namun rekannya, Ratna Juwita Sari dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengapresiasi upaya pemerintah dan PLN untuk memperbesar porsi pembangkit EBT dalam draf RUPL 2021–2030 seraya mengingatkan soal belanja investasinya.

Dalam kesempatan yang sama, PT PLN (Persero) mengasumsikan pertumbuhan konsumsi listrik dalam 10 tahun ke depan terkoreksi di angka 4,87% sebagai skenario moderat akibat dampak pandemi Covid-19.

Wakil Direktur Uta-



ma PLN Darmawan Prasodjo mengatakan angka tersebut turun dari proyeksi pertumbuhan konsumsi listrik pada RUPTL 2019—2028 yang mencapai 6,42%.

Alhasil, sebagai dampak pandemi Covid-19 permintaan konsumsi listrik nasional diproyeksikan tumbuh melambat selama tiga tahun. Hal ini membuat PLN kesulitan mencapai target bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Namun, PLN tetap berkomitmen untuk mencapai target bauran EBT 23% pada 2025.

Dia mengemukakan pula penyusunan jadwal untuk pensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara guna mencapai

target netral karbon pada 2060. Ada sekitar 50,1 gigawatt (GW) yang rencananya dipensiunkan hingga 2055. "Pada 2025—2030 itu sudah diharamkan perencanaan PLTU."

Pada 2030 direncanakan pensiun operasional PLTU *subcritical* tahap pertama sekitar 1 GW, antara lain PLTU Muarakarang, Tambaklorok, dan Gresik. Adapun untuk tahap kedua sebesar 9 GW dijadwalkan pada 2035.

Selanjutnya pada 2040 ditargetkan pensiun operasional PLTU *supercritical* sekitar 10 GW dan diteruskan untuk PLTU *ultra supercritical* tahap pertama sebesar 24 GW pada 2045 serta PLTU *ultra supercritical* terakhir sebesar 5 GW pada 2055. "Skenario *zero carbon* di 2060," kata Darmawan. ■

